



Mahkamah Syariah Lhokseumawe
Kelas I B

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



2025

LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED

DIPA 01 401664

MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lhokseumawe, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran,

Farvi Luthfi
NIP. 197612292003121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran dan Daftar	40
Lampiran A1 Rincian Aset Per 31 Desember 2025	41
Lampiran Pendukung	42



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Telp. (0645) 43925 fax. (0645) 41809
website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: ms.lhokseumawe@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang terdiri dari:
(a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan ekuitas, dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lhokseumawe, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,

Yannis Ruthfi
NIP. 197312292003121001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Unaudited Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp 2.200.000** atau mencapai 2.444 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp90.000**.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp 13,732,430,159** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp 13,732,430,159** Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar **Rp 784.598.249** Aset Tetap (neto) sebesar **Rp 13,732,430,159** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp0**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp 784.598.249** dan **Rp 12.947.831.910**

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp.0**, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp. 4,873,768,786** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp(4,873,768,786)** Surplus Kegiatan Non Operasional **Rp. 2.200.000** Pendapatan pelepasan Aset **Rp. 2.200.000** dan surplus sebelum Pos-pos Luar Biasa masing-masing

sebesar **Rp (4,871,568,786)** dan sebesar **Rp0** sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar **Rp(4,871,568,786)**

1. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar **Rp 14,110,402,476** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp(5.620.551.254)** dikurangi dengan koreksi yang menambah/mengurangi nilai Ekuitas senilai **Rp0** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp4,457,980,688** **dikurangi kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp(1.162.570.566)** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp12.947.831.910**

2. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode Unaudited yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Unaudited Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Th. 2025					Th. 2024
	Catatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (dibawah)	%	Realisasi
Pendapatan	B.1					
pendapatan PNBP	B.1	90.000	2.200.000	2.200.000	2.444	830.000
JUMLAH PENDAPATAN		90.000	2.200.000	2.200.000	2.444	830.000
BELANJA	B.2	4.505.311.000	4.460.180.688	(45.130.312)	99.00	
Belanja Pegawai	B.3	3.162.822.000	3.118.895.925	(43.926.763)	98.61	2.368.977.726
Belanja Barang	B.4	1.215.739.000	1.214.534.763	(1.204.237)	99.90	1.343.194.960
Belanja Modal	B.5	126.750.000	126.750.000	0	100	
Belanja Bantuan Sosial	B.6					
JUMLAH BELANJA		3.756.115.000	3.712.172.726	(43.942.274)	99.00	3.712.172.726

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.133.328.925	2.368.001.766
Beban Persediaan	D.3	43.570.000	31.042.900
Beban Barang dan Jasa	D.4	804.889.584	902.929.261
Beban Pemeliharaan	D.5	346.495.520	358.375.799
Beban Perjalanan Dinas	D.6	28.325.440	50.847.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	517.159.317	497.600.422
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	0	0
JUMLAH BEBAN		4.873.768.786	(4.208.797.148)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.873.768.786)	4.208.797.148
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Beban Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.200.000	830.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	2.200.000	830.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.871.568.786)	4.207.967.148
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.12	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.871.568.786)	4.207.967.148

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	14.110.402.476	13.392.100.268
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-5.620.551.254	-4.207.967.148
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	1.187.446.630
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	-	1.187.446.630
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	4.457.980.688	3.738.822.726
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		-1.162.570.566	718.302.208
EKUITAS AKHIR	E.6	12.947.831.910	14.110.402.476

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan Jalan Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem

akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Unaudited tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Unaudited tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Pendapatan- **(1) Pendapatan- LRA**

LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memperoleh alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar **Rp 3.854.165.000** Selama Tahun 2025 dilakukan revisi atas DIPA Awal Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang disebabkan adanya Refocussing, Penghematan belanja Pemerintah serta Relokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan termasuk penyelesaian pagu minus pegawai. Anggaran Awal dan Anggaran Revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB		
Jumlah Pendapatan	90.000	90.000
Belanja		
Belanja Pegawai	2.336.729.000	3.162.822.000
Belanja Barang	1.390.686.000	1.215.739.000
Belanja Modal	126.750.000	126.750.000
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	3.854.165.000	4.505.311.000

*Realisasi Pendapatan
Rp2.200.000*

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2025 adalah sebesar **Rp2.200.000** atau mencapai **2.444** persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp90.000** Rincian pendapatan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	90.000	2.200.000	2.444,00
PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0,00
PENERIMAAN HIBAH	0	0	0,00
Jumlah	0	2.200.000	2.444,00

Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami perubahan dibandingkan TA 2023 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	2.200.000	830.000	165,06
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan, Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00
Pendapatan Denda	0	0	0,00
Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	2.200.000	830.000	165,06

*Realisasi Belanja
Negara.
Rp4.460.180.688*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2025 adalah sebesar Rp 4.460.180.688 atau 99,00% dari anggaran belanja sebesar Rp4.505.311.000 Rincian anggaran adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.162.822.000	3.118.895.925	98,61
Belanja Barang	1.215.739.000	1.214.534.763	99,90
Belanja Modal	126.750.000	126.750.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial		0	0,00
Total Belanja Kotor	4.505.311.000	4.460.180.688	99,00
Pengembalian	0		0,00
Jumlah	4.505.311.000	4.460.180.688	99,00

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Des 2025 mengalami **kenaikan sebesar Rp.748.007.972** 20,15 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Des 2024 Hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di belanja pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.118.895.925	2.368.977.756	31,66
Belanja Barang	1.214.534.763	1.343.194.960	(9,58)
Belanja Modal	126.750.000	-	100,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Jumlah	4.460.180.688	3.712.172.716	20,15

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp3.118.895.925

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Des 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp3.118.895.925** dan **Rp2.368.977.756** Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami Penurunan sebanyak 10,15 persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain adanya mutasi pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 20254	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.118.895.925	2.368.977.756	31,66%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	0,00%
Belanja Honorarium	-	-	0,00%
Belanja Lembur	-	-	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	3.118.895.925	2.368.977.756	31,66%
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0%
Jumlah Belanja	3.118.895.925	2.368.977.756	31,66%

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang
Rp1.214.534.763

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Des 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp1.214.534.763** dan **Rp Rp1.343.194.960** Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami **penurunan sebesar (9.58 %)** dari Realisasi Belanja Barang TA 2025 Hal ini disebabkan antara lain kurang optimalnya dalam pengajuan GU.

Perbandingan Belanja Barang

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	522.035.203	666.134.390	(21,63)
Belanja Barang Non Operasional	1.000.000	-	100,00
Belanja Barang Persediaan	60.600.520	42.829.705	41,49
Belanja Jasa	273.108.600	236.794.871	15,34
Belanja Pemeliharaan	329.465.000	346.588.994	(4,94)
Belanja Perjalanan Dinas	28.325.440	50.847.000	(44,29)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.214.534.763	1.343.194.960	(9,58)
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	1.214.534.763	1.343.194.960	(9,58)

Realisasi Belanja Modal
Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Des 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp126.750.000** dan **Rp0** modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2025 tidak mengalami Kenaikan sebesar 100,00 persen dibandingkan 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2025 dan TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.750.000	0	100,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	126.750.000	0	100,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	126.750.000	0	100,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp126.750.000*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar **Rp126.750.000** tidak mengalami kenaikan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan 2024 sebesar **Rp0**. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran belanja modal peralatan dan mesin selama TA 2025

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	126.750.000	0	100,00
Jumlah Belanja Kotor	126.750.000	0	100,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	126.750.000	0	(100,00)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar
Rp0

Jumlah Aset Lancar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

C. 1. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara pertanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
BANK SYARIAH INDONESIA	0	0
Jumlah	0	0

C. 1. 2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara
Penerimaan Rp0

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**

C. 2 Aset Tetap

Aset Tetap

Rp13.732.430.159

Saldo Aset Tetap Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp13.732.430.159** dan **Rp14.122.839.476** Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C. 2. 1 Tanah

Tanah

Rp7.523.513.000.

Tanah yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp7.523.513.000** dan **Rp7.523.513.000**.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2024	7.523.513.000
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Mutasi Kurang :	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Des 2025	7.523.513.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2025	-
Nilai Buku per 31 Des 2025	7.523.513.000

Rincian Saldo Tanah per 31 Des 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Tanah TA 2025

(dalam rupiah)

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	700 m2	Jln Pinang Raya Desa Paya Punteut Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe	561.595.000
2	835 m2	Jln. Malahayati. No. 22 Simpang Empat Kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe	2.373.813.000
3	3059 m2	Jln. Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua kota Lhokseumawe	4.588.105.000
4			
Jumlah			7.523.513.000

C. 2. 2 Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Perlatan dan Mesin Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp2.733.575.657** dan **Rp2.597.664.107**. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin
Rp2.733.575.657

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2025	2.733.575.657
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Saldo per 31 Des 2025	2.733.575.657
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2025	- 2.264.237.572
Nilai Buku per 31 Des 2025	469.338.085

C. 2. 3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp9.401.573.509** dan **Rp7.898.476.509**. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan
Rp9.401.573.509

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2025

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2025	9.401.573.509
Mutasi tambah :	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Des 2025	9.401.573.509
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2025	- 3.663.382.544
Nilai Buku per 31 Des 2025	5.738.190.965

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Des 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C. 2. 5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp1.388.109** dan **Rp1.388.109** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2025	1.388.109
Mutasi tambah :	
-	-
Mutasi Kurang	-
-	
Saldo per 31 Des 2025	1.388.109
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2025	-
Nilai Buku per 31 Des 2025	1.388.109

Aset Tetap Lainnya
Rp1.388.109

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C. 2. 6 Akumulasi Penyusutan Aset

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Des 2025 dan 2024 masing – masing adalah sebesar **Rp(5.927.620.116)** dan **Rp(5.410.779.249)** Akumulasi Penyusutan Aset merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain bentuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset per 31 Des 2025 :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

Akumulasi

Penyusutan Aset

Rp-(5.927.620.116)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.733.575.657	(2.264.237.572)	469.338.085
2	Gedung dan Bangunan	9.401.573.509	(3.663.382.544)	5.738.190.965
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		12.135.149.166	(5.927.620.116)	6.207.529.050

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Rp 11.520.000

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp11.520.000** dan **Rp4.700.000**

Aset Tak Berwujud merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak memiliki wujud fisik.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2024	4.700.000
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Saldo per31 Desi 2025	1.132.000
Amortisasi s.d 31 Des 2025	- 11.838.450
Nilai Buku per 31 Des 2025	-

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Software	4.700.000
2	-	
Jumlah		4.700.000

C.3.2. Aset Lain -lain

Aset Lain - lain

Rp318.450

Aset Lain - lain per tanggal 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp318.450** dan **Rp27.420.000** Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Des 2024		318.450
Mutasi tambah :		
Reklasifikasi dari Aset Tetap		-
Mutasi kurang :		
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan		-
Penghapusan BMN		-
Saldo per 31 Des 2025		318.450
Amortisasi s.d 31 Des 2025	-	318.450
Nilai Buku per 31 Des 2025		-

Rincian Aset Lain - lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp(318.450) dan Rp(318.450)**

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2025

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud	4.700.000	-	
1	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
B	Aset Lain-lain	318.450	- 318.450	-
	Jumlah	-	-	-
	Total	318.450	- 318.450	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C. 4 Kewajiban Jangka Pendek

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(318.450)*

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp784.598.249*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atas jatuh tempk dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp784.598.249** dan **Rp12.437.000**

C. 4.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

Uang Muka dari KPPN per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C. 4.2. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp784.598.249*

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp784.598.249** dan **Rp12.437.000**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Utang kepada Pihak Ketiga	784.598.249
2	Utang yang belum ditagih	-
3	Uang muka dari KPPN	-
	Total	784.598.249

Pendapatan Jasa Giro merupakan bunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada **Treasury**

National Pooling (TNP) dan belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan Uang Makan Pegawai bulan Juni yang belum dibayarkan kepada para pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

C. 4.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp784.598.249** dan **Rp12.437.000**, merupakan kewajiban pemerintah kepada Pihak Ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut :

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp784.598.249*

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	784.598.249	12.437.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Uang Muka dari KPPN	-	-
Jumlah	784.598.249	12.437.000

C. 5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **RP.12.947.831.910** dan **Rp14.110.402.476**. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Ekuitas
Rp12.947.831.910*

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNPB
Rp2.200.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.2.200.000 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.200.000	0	10000,00%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0,00%
Pendapatan Lain - lain	0	0	0,00%
Jumlah	2.200.000	0	10000,00%

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yang merupakan belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai Rp.
3.133.328.925,-*

Jumlah Beban Pegawai pada 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp3.133.328.925,-** dan **Rp2.368.978.078,-** Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	3.133.328.925	2.368.977.766	32,27
Beban Tunjangan - Tunjangan	0	0	0,00
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0,00
Beban Lembur	0	0	0,00
Jumlah Beban	3.133.328.925	2.368.977.766	32,27

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp.43.570.000,-*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp43.570.000** dan **Rp42.829.705**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	43.570.000	42.829.705	1,73
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban	43.570.000	42.829.705	1,73

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa
Rp804.889.584,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp804.889.584** dan **Rp945.758.966**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa

konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban – beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian asset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	463.136.488	608.541.796	(23,89)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	56.610.000	38.736.000	46,14
Beban Barang Non Operasional	1.000.000	42.829.705	100,00
Beban Belanja Persediaan	60.600.520	0	(100,00)
Beban Barang Operasional Lainnya	2.000.000	17.360.000	(88,48)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	163.500.000	0	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	288.715	1.496.594	(80,71)
Beban Sewa	109.608.600	236.794.871	(53,71)
Jumlah Beban	856.744.323	945.758.966	(9,41)

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp346.495.520,-*

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp346.495.520,-** dan **Rp345.537.250**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban Pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas asset – asset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	185.000.000	202.000.000	(15.45)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	14.000.000	100.00
Beban Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144.465.000	130.590.000	10.34
Jumlah Beban	329.465.000	346.588.994	(19.48)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp28.325.440,-*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp28.325.440** dan **Rp50.850.000** Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan yang perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024

adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Biasa	28.325.440	50.847.000	(44,29)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
Jumlah Beban	28.325.440	50.847.000	(44,29)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp517.159.317*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp517.159.317** dan **Rp497.600.422**. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Surplus/Defisit
Kegiatan Non
Operasional
Rp2.200.000,-*

D.8 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit kegiatan non operasional dari pendapatan tahun 2025 Rp. 2.200.000 dan 2024 Rp. 0.

*Surplus/Defisit LO
Rp. (4.871.568.786)*

D.9 Surplus/ Defisit LO

Surplus/Defisit LO terdiri dari Kegiatan Operasional dan Non Operasional dan juga Pos Luar Biasa. Periode 31 Des 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp(4.871.568.786,-)** dan **Rp(4.207.967.148,-)**.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp14.110.402.476,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 14.110.402.476,-** dan **Rp13.392.100.268**

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp(5.620.551.254)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah deficit sebesar **Rp(5.620.551.254)** dan **Rp(4.207.967.148)**. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Selisih Revaluasi Aset
Rp0.

E. 3. 1 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp 0**.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0,-

E. 3. 2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0,-** dan **Rp Rp1.187.446.630**.

Koreksi Lain-Lain
Rp0

E. 4. 5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas

beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E. 5 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp4.457.980.688,-*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Des2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp4.457.980.688,-** dan **Rp3.738.822.728**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas TA 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	-

E. 6. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp12.947.831.910,-*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing Adalah sebesar **Rp12.947.831.910,-** dan **Rp14.110.402.476,-**.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

NIHIL.

F. 1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 129/W1-A501/KP.07.6/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 tentang perubahan Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Yarvis Luthfi, S.H.

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Abdul Mutalib, A.Md, S.H

Bendahara Pengeluaran : Siti Hartina Silalahi, Md A.B

Administrastor : Ikhsan, S.T

Bendahara Penerimaan : Fatimah, S.E

Operator : Slamet Riyadi, S.Kom

Operator : Siti Mawaddah, S.Sos.I

F.1.2. Pengungkapan Capaian Output

LAPORAN KINERJA MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

PERIODE DESEMBER 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI

Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi

Satuan Kerja : Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Fungsi : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan

Sub Fungsi : Layanan Dukungan Manajemen

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuann	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1071	Layanan Sarana Internal	126.750.000	126.750.000	100.00	1	1,00	Unit	100.00	Kegiatan sudah dilaksanakandan terealisasi 100%
6986	Layanan Umum	700.000	700.000	100.00	1	1,00	Laporan	100.00	Kegiatan sudah dilksanakan dan realiasi 100%
6986	Layanan Perkantoran	4.377.561.000	4.332.430.703	100.00	1	1,00	Layanan	100.00	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan
6986	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100.00	1	1,00	Dokumen	100.00	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan realiasi 100%

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
UNAUDITED TAHUN 2025**

Kode dan Nama UAKPA : (401664) KANTOR MAHKAMAH SYAR'İYAH LHKOSEUMAWE

Kode dan Nama UAPPAW : (0600) MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH



Kode dan Nama Eselon 1 : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	V		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	V		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	V		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		V	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan		V	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		V	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
a.	Pagu/DIPA		V	Tidak
b.	Estimasi PNB		V	Tidak
c.	Belanja		V	Tidak
d.	Pengembangan Belanja		V	Tidak
e.	Pendapatan		V	Tidak
f.	Pengembangan Belanja		V	Tidak
g.	Kas BLU		V	Tidak
h.	Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak

	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal)		V	Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		V	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak

		Ada	Tidak	Seharusnya
	Hibah Langsung			
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		V	Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di		V	Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		V	Tidak
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		V	Tidak
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		V	Tidak
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		V	Tidak
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		V	Tidak
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		V	Tidak
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada		V	Tidak
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk		V	Tidak
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		V	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar		V	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		V	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		V	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan		V	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		V	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang		V	Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat		V	Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar		V	Ya
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"		V	Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak

Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai		V	Tidak
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan		V	Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah		V	Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	V		Ya
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua? Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		V	Tidak
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk</i>				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,		Kusumawati, 31 Desember 2025		
 IHKSAN		 Anis Luthfi		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KPPN LHOKSEUMAWE

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 401664 - MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 22/01/26 10:07

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,505,311,000	4,505,311,000	0
2	Belanja	4,460,180,703	4,460,180,703	0
3	Pengembalian Belanja	-15	-15	0
4	Estimasi Pendapatan	90,000	90,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,200,000	2,200,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401664) MAHKAMAH SYAR'YAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 18/02/26 7:39 AM

Tgl Cetak : 18/02/26 3:59 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,133,328,925	2,368,001,766	765,327,159	32.32
Beban Persediaan	43,570,000	31,042,900	12,527,100	40.354
Beban Barang dan Jasa	804,889,584	902,929,261	(98,039,677)	(10.858)
Beban Pemeliharaan	346,495,520	358,375,799	(11,880,279)	(3.315)
Beban Perjalanan Dinas	28,325,440	50,847,000	(22,521,560)	(44.293)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401664) MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 18/02/26 7:39 AM

Tgl Cetak : 18/02/26 3:59 PM

Halaman : 2

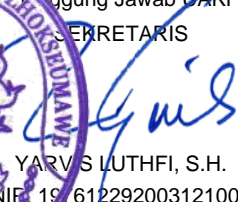
lap_lo_satker_poc


URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	517,159,317	497,600,422	19,558,895	3.931
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,873,768,786	4,208,797,148	664,971,638	15.8
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,873,768,786)	(4,208,797,148)	(664,971,638)	15.8
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	2,200,000	830,000	1,370,000	165.06
Pendapatan Pelepasan Aset	2,200,000	830,000	1,370,000	165.06
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,200,000	830,000	1,370,000	165.06
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,871,568,786)	(4,207,967,148)	(663,601,638)	15.77
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,871,568,786)	(4,207,967,148)	(663,601,638)	15.77

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

MAKAMAH SYAR'IAH HOKSEUMAWE, 18 Februari 2026
Tanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

YARVIS LUTHFI, S.H.
NIP. 197612292003121001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401664) MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 19/02/26 12:44 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 9:42 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	14,110,402,476	13,392,100,268	718,302,208	5.36
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,620,551,254)	(4,207,967,148)	(1,412,584,106)	33.57
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	1,187,446,630	(1,187,446,630)	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	1,187,446,630	(1,187,446,630)	(100)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,457,980,688	3,738,822,726	719,157,962	19.23
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,162,570,566)	718,302,208	(1,880,872,774)	(261.85)
EKUITAS AKHIR	12,947,831,910	14,110,402,476	(1,162,570,566)	(8.24)

Keterangan :

FINAL

LHOKSEUMAWE, 19 Februari 2026

Pangung Jawab LAKPA

SEKRETARIS



YARIS LUTHFI, S.H.

NIP. 17612292003121001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : MAHKAMAH SYAR'YAH LHOK SEUMAWE 401664

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 9:42 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,505,311,000	4,460,180,688	(45,130,312)	99.00	3,756,115,000	3,712,172,726	(43,942,274)	98.83
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

LHOKSEUMAWE, 19 Februari 2026

Yang Meng Jawab UAKPA

SEKRETARIS



YARVIS LUTHFI, S.H.

NIS. 10762292003121001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0600 **NANGGROE ACEH DARUSSALAM**
SATUAN KERJA : 401664 **MAHKAMAH SYAR'YAH LHOK SEUMAWÉ**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 19/02/26 9:43 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 19/2/26 8:33 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,008,759,000	1,139,439,000	1,136,206,620	0	1,136,206,620	99.72	3,232,380
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,000	14,000	13,596	15	13,581	97.01	419
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	93,678,000	78,655,000	77,329,758	0	77,329,758	98.32	1,325,242
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	23,006,000	27,225,000	27,001,614	0	27,001,614	99.18	223,386
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36,400,000	36,400,000	35,860,000	0	35,860,000	98.52	540,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	761,350,000	136,410,000	136,410,000	0	136,410,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	123,736,000	17,500,000	17,393,617	0	17,393,617	99.39	106,383
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	50,214,000	61,585,000	61,194,900	0	61,194,900	99.37	390,100
511129	Belanja Uang Makan PNS	164,480,000	193,366,000	185,268,000	0	185,268,000	95.81	8,098,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,290,000	14,170,000	14,070,000	0	14,070,000	99.29	100,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	64,800,000	64,800,000	62,100,000	0	62,100,000	95.83	2,700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,336,729,000	1,769,564,000	1,752,848,105	15	1,752,848,090	99.06	16,715,910
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	181,616,000	167,445,823	0	167,445,823	92.2	14,170,177
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	1,054,200,000	1,054,200,000	0	1,054,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	0	1,235,816,000	1,221,645,823	0	1,221,645,823	98.85	14,170,177
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	104,556,000	104,256,000	0	104,256,000	99.71	300,000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	5,000	1,540	0	1,540	30.8	3,460
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	7,500,000	5,576,680	0	5,576,680	74.36	1,923,320
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	4,000,000	1,828,832	0	1,828,832	45.72	2,171,168
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	6,583,000	6,580,000	0	6,580,000	99.95	3,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	6,375,000	6,372,960	0	6,372,960	99.97	2,040
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	28,423,000	19,786,000	0	19,786,000	69.61	8,637,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	157,442,000	144,402,012	0	144,402,012	91.72	13,039,988
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,336,729,000	3,162,822,000	3,118,895,940	15	3,118,895,925	98.61	43,926,075
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	631,205,000	464,203,000	463,136,488	0	463,136,488	99.77	1,066,512
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,200,000	300,000	288,715	0	288,715	96.24	11,285
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	60,600,000	56,610,000	56,610,000	0	56,610,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6,220,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0600 **NANGGROE ACEH DARUSSALAM**
SATUAN KERJA : 401664 **MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWÉ**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 19/02/26 9:43 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 19/2/26 8:33 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	705,225,000	523,113,000	522,035,203	0	522,035,203	99.79	1,077,797
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	700,000	0	700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,601,000	60,601,000	60,600,520	0	60,600,520	100	480
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	60,601,000	60,601,000	60,600,520	0	60,600,520	100	480
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	1,200,000	0	0	0	0		0
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	163,500,000	163,500,000	163,500,000	0	163,500,000	100	0
522141	Belanja Sewa	101,700,000	109,610,000	109,608,600	0	109,608,600	100	1,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	266,400,000	273,110,000	273,108,600	0	273,108,600	100	1,400
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	160,000,000	185,000,000	185,000,000	0	185,000,000	100	0
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	14,000,000	0	0	0	0		0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	126,790,000	144,580,000	144,465,000	0	144,465,000	99.92	115,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	300,790,000	329,580,000	329,465,000	0	329,465,000	99.97	115,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56,670,000	28,335,000	28,325,440	0	28,325,440	99.97	9,560
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	56,670,000	28,335,000	28,325,440	0	28,325,440	99.97	9,560
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,390,686,000	1,215,739,000	1,214,534,763	0	1,214,534,763	99.9	1,204,237
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126,750,000	126,750,000	126,750,000	0	126,750,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	126,750,000	126,750,000	126,750,000	0	126,750,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	126,750,000	126,750,000	126,750,000	0	126,750,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	3,854,165,000	4,505,311,000	4,460,180,703	15	4,460,180,688	99	45,130,312

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 0600 NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : 401664 MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWÉ

Kode Lap : LRA.P.E1.1
 Tanggal : 19/02/26 9:43 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,200,000	0	2,200,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	90,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	90,000	2,200,000	0	2,200,000	2,444.44
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	90,000	2,200,000	0	2,200,000	2,444.44
	JUMLAH PENDAPATAN	90,000	2,200,000	0	2,200,000	2,444.44

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401664) MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 9:40 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET TETAP				
Tanah	7,523,513,000	7,523,513,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,733,575,657	2,607,144,107	126,431,550	4.85
Gedung dan Bangunan	9,401,573,509	9,401,573,509	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,388,109	1,388,109	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,927,620,116)	(5,410,779,249)	(516,840,867)	9.55
JUMLAH ASET TETAP	13,732,430,159	14,122,839,476	(390,409,317)	(2.76)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	11,520,000	4,700,000	6,820,000	145.11
Aset Lain-lain	318,450	27,420,000	(27,101,550)	(98.84)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(11,838,450)	(32,120,000)	20,281,550	(63.14)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	13,732,430,159	14,122,839,476	(390,409,317)	(2.76)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	784,598,249	12,437,000	772,161,249	6,208.58
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	784,598,249	12,437,000	772,161,249	6,208.58
JUMLAH KEWAJIBAN	784,598,249	12,437,000	772,161,249	6,208.58
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	12,947,831,910	14,110,402,476	(1,162,570,566)	(8.24)
JUMLAH EKUITAS	12,947,831,910	14,110,402,476	(1,162,570,566)	(8.24)
JUMLAH EKUITAS	12,947,831,910	14,110,402,476	(1,162,570,566)	(8.24)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	13,732,430,159	14,122,839,476	(390,409,317)	(2.76)

Keterangan :

FINAL

LHOKSEUMAWE, 19 Februari 2026

Yang bertanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



YARVIS LUTHFI, S.H.

NIP. 197612292003121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (401664) MAHKAMAH SYAR'YAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 9:42 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	7,523,513,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,733,575,657	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,401,573,509	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,388,109	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,264,237,572
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,663,382,544
0.0	162151	Software	11,520,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	318,450	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	318,450
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	11,520,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	775,852,468
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	8,745,781
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,460,180,688
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,200,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	14,110,402,476
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,200,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,136,206,620	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13,581	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	77,329,758	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	27,001,614	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	35,860,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	136,410,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	17,393,617	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	61,194,900	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	192,876,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	14,070,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	62,100,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	337,128,291	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,633,500,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	104,256,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,540	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,576,680	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,828,832	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	6,580,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	6,372,960	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	26,611,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	471,882,269	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	288,715	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (401664) MAHKAMAH SYAR'YAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 9:42 AM

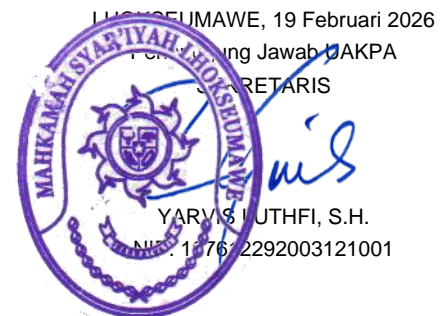
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	56,610,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,000,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	163,500,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	109,608,600	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	185,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144,465,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28,325,440	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	221,282,156	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	295,877,161	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	43,570,000	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	17,030,520	0
JUMLAH			25,296,839,979	25,296,839,979

Keterangan :

FINAL



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (401664) MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 19/02/26 12:44 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 9:42 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,460,180,688
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,200,000	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,200,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,136,206,620	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,596	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	77,329,758	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	27,001,614	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	35,860,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	136,410,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	17,393,617	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	61,194,900	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	185,268,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	14,070,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	62,100,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	167,445,823	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,054,200,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	104,256,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,540	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,576,680	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,828,832	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6,580,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6,372,960	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	19,786,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	463,136,488	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	288,715	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56,610,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,000,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,600,520	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	163,500,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	109,608,600	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	185,000,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144,465,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,325,440	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126,750,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	15

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (401664) MAHKAMAH SYAR'YAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 19/02/26 12:44 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 9:42 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			4,462,380,703	4,462,380,703

Keterangan :

FINAL

LHOKSEUMAWE, 19 Februari 2026

Peranggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



YARVIS LUTHFI, S.H.

1976-2292003121001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Eselon I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : 0600 NANGGROE ACEH DARUSSALAM
 Satuan Kerja : 401664 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Belanja yang Masih Harus Dibayar

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/> Piutang Jangka Pendek
<input checked="" type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
<input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Kas Lainnya di BLU
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/> Persediaan	<input type="checkbox"/> Perolehan Aset
<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban	<input type="checkbox"/> Koreksi Piutang/Utang
<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	<input type="checkbox"/> Hibah Langsung
<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	<input type="checkbox"/>

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	511129	Beban Uang Makan PNS	20.045.000	
	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		20.045.000
2	511628	Beban Uang Makan PPPK	6.825.000	
	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		6.825.000
3	522111	Beban Langganan Listrik	8.745.781	
	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		8.745.781
4	511339	Belanja Tunjangan Pejabat Negara	579.300.000	
	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		579.300.000
5	511324	Belanja PPh Tunjangan Pejabat Negara	169.682.468	
	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		169.682.468

Dibuat oleh :
Petugas Akuntansi

Siti Mawaddah, S.Sos.I
Tanggal : 31 Desember 2025



Dijetujui :
Yarvis Khatfi, S.H
Tanggal : 31 Desember 2025

Direkam oleh :
Operator GLP


Siti Mawaddah, S.Sos.I
Tanggal : 31 Desember 2025

**KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
per 31 Desember 2025**

K/L : (005) Mahkamah Agung
 BAES1 : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0600) Aceh
 Satuan Kerja : Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	0600	Aceh	401664	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	2025	511129	Belanja Uang Makan PNS	20.045.000	SPM No: 00009A Tanggal 9 Januari 2026	Susulan uang makan PNS bulan Desember 2025
2	0600	Aceh	401664	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	2025	511628	Belanja Uang Makan PPPK	6.825.000	SPM No: 00004A Tanggal 5 Januari 2026	Susulan uang makan PPPK bulan Desember 2025
3	0600	Aceh	401664	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	2025	522111	Belanja Langganan Telepon	8.745.781	Id PLN. 112200768793 Tanggal 19 Januari 2026	Beban Langganan PLN Bulan Desember 2025
4	0600	Aceh	401664	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	2025	511339	Belanja Tunjangan Pejabat Negara	579.300.000	Daftar Perhitungan berdasarkan Gaji Web	Susulan Tunjangan Pejabat Negara 3 bulan di tahun 2025
5	0600	Aceh	401664	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	2025	511324	Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara	169.682.468	Daftar Perhitungan berdasarkan Gaji Web	Susulan Tunjangan PPH Pejabat Negara 3 bulan di tahun 2025
JUMLAH TOTAL								784.598.249		

Lhokseumawe, 31 Desember 2026
 Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



Maris Luthfi
 NIP. 197612292003121001